

FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI POLITIK (Suatu Studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud)

Oleh : Jenli Maarotong¹

ABSTRAK

Sebagai pilar dalam demokrasi, partai politik mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai sarana rekrutmen politik, pendidikan politik, dan komunikasi politik. Pada kenyataannya fungsi partai politik terutama dibidang komunikasi politik hingga kini dirasa masih sangat lemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi partai politik PDIP dalam melaksanakan komunikasi politik di Kecamatan Essang Kabupaten Talaud, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh PDIP Kecamatan Essang hanyalah terbatas pada tingkatan internal pengurus partai, sedangkan dengan kader dan simpatisannya terbatas pada saat menjelang kampanye pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun legislative, sehingga secara umum PDIP Kecamatan Essang belum melaksanakan fungsi komunikasi politik secara maksimal.

Kata Kunci: Partai politik; Komunikasi Politik.

ABSTRACT

As a pillar in democracy, political parties have several functions, among others, as a means of political recruitment, political education, and political communication. In fact, the function of political parties, especially in the field of political communication, is still considered to be very weak. This study aims to find out how the PDIP political party functions in carrying out political communication in the Essang District of Talaud Regency, using qualitative descriptive methods. The research findings show that political communication conducted by the Essang District PDIP is only limited to the internal level of party officials, while the cadres and sympathizers are limited to approaching the general election campaign, both presidential and legislative elections, so that in general the Essang District PDIP has not yet carried out the political communication function maximally.

Keywords: Political Parties; Political Communication.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dalam pelaksanaannya kedaulatan tersebut diserahkan kepada wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen. Karena itu setiap 5 tahun sekali Indonesia melakukan Pemilihan Umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga tersebut. Para wakil rakyat berasal dari partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat. Partai politik dalam pelaksanaannya melakukan fungsi-fungsi partai politik yang salah satunya adalah komunikasi politik. Salah satu fungsi dari komunikasi politik yang perlu dilakukan oleh partai politik adalah penyampaian informasi-informasi yang ada di partai politik terhadap masyarakat luas dan anggota partai politik sendiri.

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

Pelaksanaan komunikasi politik dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam komunikasi politik, yaitu: sumber, pesan, saluran, umpan balik dan *audiens* atau pendengar” (Rush dan Allthof, 1995: 225). Namun dalam pelaksanaannya, komunikasi politik seringkali mengalami permasalahan. Karena itu sebuah sistem harus berjalan dengan baik dan saling mendukung agar isi pesan tersampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pelaksanaan fungsi komunikasi politik membutuhkan saluran yang tepat agar tidak terjadi miskomunikasi. Saluran ini bisa berupa media elektronik maupun cetak. Saluran komunikasi politik ini merupakan sarana penghubung antara komunikator dan komunikan. Agar komunikasi politik berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan perlu adanya kesatuan dan hubungan yang baik antara orang-orang yang ada di partai politik tersebut. Komunikasi politik tidak dapat dilakukan secara intern saja tetapi juga ekstern.

Fungsi komunikasi politik sangat menentukan dalam pelaksanaan program partai politik karena dalam melaksanakan program harus adanya kesatuan antara komunikator dan komunikan yang ada di partai politik tersebut. Partai massa mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota; oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukung-pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang sepakat untuk bernaung di bawahnya dalam memperjuangkan suatu program yang biasanya luas dan agak kabur. Kelemahan dari partai massa ialah bahwa masing-masing aliran atau kelompok yang bernaung di bawah partai massa cenderung untuk memaksakan kepentingan masing-masing, terutama pada saat-saat krisis, sehingga persatuan dalam partai dapat menjadi lemah atau hilang sama sekali sehingga salah satu golongan memisahkan diri dan mendirikan partai baru”. (Budiardjo, 2000: 166)

Partai massa merupakan partai politik dengan tujuan untuk memperoleh anggota dengan sebanyak-banyaknya. Namun partai massa pada dasarnya tidak melihat kualitas yang akan menjadi anggota partai politik. Dari hasil observasi awal ditemukan bahwa kebanyakan anggota dan pengurus partai politik khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kecamatan Essang, sampai di desa, merupakan masyarakat menengah ke bawah dengan lulusan pendidikan rata-rata SLTP bahkan masih banyak yang masih lulusan SD. Hal ini mengakibatkan komunikasi politik sering terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi karena pola pikir anggota partai politik tersebut masih rendah.

Untuk mengubah kondisi tersebut, PDIP mulai merubah citra dirinya dari yang tadinya partai massa menjadi partai kader. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mirriam Budiardjo, bahwa: “Partai kader mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya. Pemimpin partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memcat anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan”. (Budiardjo, 2000:166)

Dalam rangka membentuk partai kader tersebut komunikasi politik sangat diperlukan untuk membentuk kader-kader partai yang berkualitas dan tidak terkesan arogan. Untuk mewujudkan komunikasi politik yang baik sesuai dengan yang diharapkan, partai politik perlu melaksanakan komunikasi politik secara tertulis maupun lisan seperti misalnya dengan menerbitkan suatu majalah atau reklame. Media ini sangat membantu partai politik dalam menjembatani antara pimpinan dengan anggota. Dalam media ini memuat informasi-informasi yang sedang berkembang di partai politik.

Di Indonesia, partai politik sebagai suprastruktur politik, memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi, karena melalui partai politik fungsi keterwakilan dapat dilaksanakan. Secara umum regulasi tentang pengaturan partai

politik, diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Pelaksanaan komunikasi politik pengurus kecamatan PDIP Essang, seringkali menemukan masalah yang menghambat proses komunikasi politik itu sendiri, misalnya terjadi miskomunikasi antara Pengurus di tingkatan Pimpinan Kabupaten dan Pimpinan kecamatan secara internal dalam menyampaikan program kerja atau kegiatan sebagai akibat dari tingkat pendidikan pengurus yang masih rendah. Program-Program Partai (PDIP) di tingkat Kabupaten, seringkali tidak tersosialisasi dengan baik sampai dengan tingkat yang paling bawah, yaitu didesa, kasus miskomunikasi ini antara lain terjadi dalam penyampaian program kampanye pada saat menjelang Pemilihan Umum yang seharusnya dilakukan secara tidak arogan, tapi di tingkat Desa sebagai tingkat yang paling bawah dan sebagai pelaksana yang berhubungan langsung dengan masyarakat justru sering berbuat arogan misalnya saja pelaksanaan kampanye yang mengutamakan kekuatan fisik, akibat hubungan yang kurang baik, yang ditimbulkan dari adanya pertengkaran, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi yang dapat membahayakan keselamatan jiwa mereka. Bahkan mereka sering mengendarai kendaraan dengan kapasitas yang melebihi batas angkutan yang dapat menimbulkan kecelakaan.

Masalah di atas memerlukan adanya kesatuan diantara unsur-unsur sistem komunikasi yang ada. Berdasarkan dari latar belakang tersebut dan melihat pentingnya pelaksanaan fungsi komunikasi politik partai politik sebagai proses penyampaian informasi bagi terlaksananya program partai sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partai Politik

Pengertian partai politik sangat beranekaragam yang telah dikemukakan oleh para ahli tergantung dari sudut pandang mana para ahli tersebut melihat partai politik. Namun pada intinya semuanya itu mengacu pada arti bahwa partai politik tersebut merupakan organisasi atau tempat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Mirriam Budiardjo (2000:160), bahwa:

“Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka”.

Definisi partai politik di atas pengertiannya hampir sama dengan yang dikemukakan oleh R.H. Soltau dalam Budiardjo (2000:161), yang mengemukakan partai politik adalah sebagai berikut :

“Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka” .

Partai politik sebagai sarana untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan merupakan ciri umum dari tujuan partai politik. Ada beberapa ciri lain seperti yang telah dikemukakan oleh La Palombara dan Weiner bahwa ciri-ciri partai politik sebagai berikut: “berakar dalam masyarakat lokal, melakukan kegiatan secara terus menerus, berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, dan ikut serta dalam pemilihan umum”. (dalam Surbakti, 1992: 115).

Berdasarkan ciri-ciri itu, suatu organisasi politik yang tidak berakar di tengah-tengah masyarakat, tidak memiliki cabang di daerah-daerah, tidak mempunyai kegiatan secara berkesinambungan, tidak ikut serta dalam pemilihan umum, dan tidak mempunyai wakil di parlemen, tidak dapat dikategorikan sebagai partai politik. Sebab tanpa memenuhi persyaratan ini, organisasi politik sulit menjalankan fungsi untuk memadukan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan memperjuangkan melalui proses politik.

Fungsi Partai politik

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dikemukakan bahwa: Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung system presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, *pertama*, membentuk sikap dan perilaku Partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. *Kedua*, memaksimalkan fungsi Partai politik baik fungsi Partai politik terhadap negara maupun fungsi Partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) disebutkan Partai politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- c. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- d. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi Partai politik sebagaimana dimaksud adalah:

1. Sosialisasi Politik

Yang dimaksud dengan sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak disengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat

penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik, dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

4. Pemadu Kepentingan

Fungsi ini merupakan salah satu fungsi utama partai politik sebelum mencari dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi pemaduan kepentingan ialah kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

5. Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.

B. Konsep Komunikasi Politik

Pengertian Komunikasi Politik

Salah satu tugas dari partai politik menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak di tampung dan di gabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini di namakan “penggabungan kepentingan“ (*interest aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “perumusan kepentingan” (*interest articulation*).

“Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah” (Surbakti, 1992:199). Pengertian mengenai komunikasi politik tersebut sama dengan apa yang dikemukakan oleh Budiardjo. Pada intinya kedua pengertian tersebut menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan proses penyaluran aspirasi. “Komunikasi politik ialah proses penyaluran aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang” (Budiardjo, 2000: 163).

Semua kegiatan di atas dilakukan oleh partai. Partai politik selanjutnya merumuskannya sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukan dalam program partai untuk di perjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah

demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Selanjutnya Nimmo (1989:10) menjelaskan kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasar konsekuensi-konsekuensinya (actual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia didalam kondisi-kondisi konflik.

Memperhatikan pengertian-pengertian diatas, jelas bahwa komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi dan terdiri dari unsur-unsur komunikasi pada umumnya. Unsur-unsur itu ialah: komunikator politik, komunikan, pesan, media, tujuan dan efek (Adhan Dambea, 2010:49).

Di lain pihak partai politik berfungsi juga untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, di mana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan warga masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering di sebut sebagai *broker* (perantara) dalam suatu bursa ide-ide (*'clearing house of ideas'*). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.

Selama ini diketahui bahwa esensi politik domestik dan politik internasional pada hakekatnya sama, walaupun manifestasi antara keduanya berbeda sebagai akibat perbedaan lingkungan. Lingkungan politik internasional adalah anarkis, sedangkan politik domestik non-anarkis. Disamping itu juga diketahui bahwa dalam seluruh sistem politik, baik yang lokal, nasional, region, maupun internasional.

Dimensi komunikasi politik terkandung tiga pola interaksi hubungan yang berdimensi komunikasi politik. *Pertama*, interaksi kompetitif dimana pencapaian tujuan oleh suatu aktor politik tidak berjalan sejajar dengan tujuan aktor-aktor politik lainnya. *Kedua*, interaksi kooperatif di mana pencapaian tujuan dipermudah dengan usaha kerjasama dan saling melengkapi antara berbagai aktor politik. *Ketiga*, interaksi kompetitif-kooperatif di mana para aktor politik mengejar tujuan ganda, sebagian tujuan tidak sejalan dan menimbulkan ketegangan, sedangkan sebagian tujuan lainnya sama sehingga dapat dicapai dengan kerjasama dan usaha yang saling melengkapi. Untuk lebih menjelaskan ketiga politik horizontal itu dapat dikemukakan contoh-contoh berikut baik dalam tingkatan domestik maupun tingkatan internasional.

Komunikator Utama Dalam Komunikasi Politik

1. Politikus sebagai komunikator politik

Orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintahan harus dan memang berkomunikasi tentang politik. Kita menamakan calon atau pemegang jabatan ini politikus, tak peduli mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karier, dan tidak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif atau yudikatif. Pekerjaan mereka adalah aspek utama dari kegiatan ini. Meskipun politikus melayani beraneka tujuan dengan berkomunikasi, ada dua yang menonjol. Daniel Katz menunjukkan bahwa pemimpin politik mengerahkan pengaruhnya ke dua arah: mempengaruhi alokasi ganjaran dan mengubah struktur sosial yang ada atau mencegah perubahan demikian.

Dalam kewenangannya yang pertama politikus itu berkomunikasi sebagai *wakil* suatu kelompok atau langgan; pesan-pesan politikus itu mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik; artinya, komunikator politik mewakili kepentingan kelompok. Sebaliknya, politikus yang bertindak sebagai ideologi tidak begitu terpusat perhatiannya kepada mendesak tuntutan seorang langgan; ia lebih menyibukkan dirinya untuk menetapkan tujuan kebijakan yang lebih luas, mengusahakan reformasi, dan bahkan mendukung perubahan revolusioner. Kedua tipe politikus ini mempengaruhi orang lain, yakni mereka bertindak dengan tujuan mempengaruhi opini orang lain.

2. *Profesional sebagai komunikator politik*

Komunikator profesional adalah peranan sosial yang relatif baru, suatu hasil sampingan dari revolusi komunikasi yang sedikitnya mempunyai dua dimensi utama: munculnya media massa yang memintasi batas-batas rasial, etnis, pekerjaan, wilayah, dan kelas untuk meningkatkan kesadaran identitas nasional; dan perkembangan serta-merta media khusus (seperti majalah untuk khalayak khusus, stasiun radio, dsb) yang menciptakan publik baru untuk menjadi konsumen informasi dan hiburan. Seorang komunikator profesional, kata James Carey, adalah seorang makelar simbol, orang yang menerjemahkan sikap, pengetahuan, dan minat satu komunitas bahasa ke dalam istilah-istilah komunitas bahasa yang lain yang berbeda tetapi menarik dan dapat di mengerti. Komunikator profesional menghubungkan golongan elit dalam organisasi atau komunitas mana pun dengan khalayak umum; secara horizontal ia menghubungkan dua komunitas bahasa yang dibedakan pada tingkat struktur sosial yang sama. Maka komunikator profesional adalah manipulator dan makelar simbol yang menghubungkan para pemimpin satu sama lain dan dengan para pengikut.

3. *Aktifis sebagai komunikator politik*

Pertama, terdapat juru bicara bagi kepentingan yang terorganisasi. Pada umumnya orang ini tidak memegang ataupun mencita-citakan jabatan pada pemerintah; dalam hal ini komunikator tersebut tidak seperti politikus yang membuat politik menjadi lapangan kerjanya. Juru bicara ini biasanya juga bukan profesional dalam komunikasi. Namun, ia cukup terlibat baik dalam politik maupun dalam komunikasi sehingga dapat disebut aktifis dan semi profesional dalam komunikasi politik. Berbicara untuk kepentingan yang terorganisasi merupakan peran yang serupa dengan peran politikus yang menjadi wakil partisan, yakni mewakili tuntutan keanggotaan suatu organisasi dan tawar-menawar untuk pemeriksaan yang menguntungkan.

Kedua, jaringan interpersonal mencakup komunikator politik utama, yakni *pemuka pendapat*. Sebuah badan penelitian yang besar menunjukkan bahwa banyak warga negara yang dihadapkan pada pembuatan keputusan yang bersifat politis (seperti memilih untuk calon apa) memintanya petunjuk dari orang-orang yang dihormati mereka, apakah untuk mengetahui apa yang harus dilakukannya atau untuk memperkuat putusan yang telah dibuatnya. Orang yang dimintai petunjuk dan informasinya itu adalah “pemuka pendapat”.

Komunikasikan Dalam Komunikasi Politik

Komunikasi, telah kita katakan, terlibat dalam perbuatan gabungan, atau transaksi, antara sumber dan penerima. Khalayak komunikasi politik bukanlah wadah yang pasif yang ke dalamnya para pemimpin politik dengan berbagi karakterlistrik dan motif hanya menuangkan beraneka imbauan dengan menggunakan bahasa, simbol, paranti, dan media yang menarik. Alih-alih, penerima adalah partisipan yang aktif dalam komunikasi dengan sumber-mengindera, menginterpretasikan, membayangkan, menetapkan, dan, kalau tidak, berbuat sendiri dengan cara yang memiliki nilai berita. Dengan pengertian ini, karena itu, dikotomi di antara komunikator dan khalayak, pemimpin dan pengikut, itu tidak benar. Paling-paling perbedan itu arbiter; di mana setiap orang sesungguhnya adalah suatu jenis komunikator politik; hanyalah masalah perspektif untuk menentukan pihak mana yang kita sebut komunikator dan mana komunikate. (Nimmo, 2004:64)

Saluran Komunikasi Politik

Dengan mengingat bahwa manusia adalah saluran dan juga sumber serta penerima dalam komunikasi, maka yang pertama-tama kita tekankan ialah saluran manusia bagi komunikasi politik. Namun, kita tidak akan mengabaikan media mekanis, teknik, dan sarana yang meningkatkan konstruksi citra manusia melalui saling tukar lambang. Akan tetapi, justru itulah guna alat-alat tersebut, yakni untuk memudahkan., tetapi bukan untuk menjamin ketepatan. Sebaliknya, bila dipikirkan bahwa pada dasarnya manusia, maka saluran komunikasi itu lebih daripada sekadar titik sambungan, tetapi terdidri atas pengertian bersama tentang siapa dapat berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana, sejauhmana dapatnya dipercaya. (Nimmo, 2004:68)

Adapun tipe-tipe saluran komunikasi sebagai berikut: (Nimmo, 2004:71-73)

1. Saluran komunikasi massa
Ada dua bentuk saluran komunikasi massa, masing-masing berdasarkan tingkat langsungnya komunikasi satu kepada banyak. Bentuk yang pertama terdiri atas komunikasi tatap muka. Bentuk yang kedua terjadi jika ada perantara ditempatkan antara komunikator dan khalayak. Di sisi media, teknologi, sarana, dan alat komunikasi lainnya turut serta.
2. Saluran komunikasi interpersonal
Saluran komunikasi interpersonal merupakan bentukan dari hubungan satu-kepada-satu. Saluran ini pun bisa berbentuk tatap muka maupun berperantara.
3. Saluran komunikasi organisasi
Komunikasi organisasi menggabungkan penyampaian satu-kepada-satu dan satu-kepada-banyak. Akan tetapi, kebanyakan organisasi politik begitu besar sehingga komunikasi satu-kepada-satu dengan seluruh anggotanya mustahil bisa dilaksanakan. Oleh sebab itu, ada sarana untuk komunikasi satu-kepada-banyak yang berperantara di dalam organisasi: pengedaran memorandum, sidang, konvensi.

Faktor Pendorong Dan Penghambat Pelaksanaan Komunikasi Politik

Faktor pendorong dan faktor penghambat, seperti dibawah ini:

1. Hubungan komunikator-komunikan (Nimmo, 2001:125)
Politikus, baik representatif maupun ideologi, berkomunikasi untuk kepentingan para pemilih atau untuk kepentingan tujuan. Juru bicara

kelompok terorganisasi dan pemuka pendapat memainkan peran yang jauh lebih aktif dalam komunikasi politik dibandingkan dengan warga negara pada umumnya. Dalam komunikasi politik, partisipan adalah anggota khalayak yang aktif yang tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan oleh para pemimpin politik, tetapi juga menanggapi dan bertukar pesan dengan para pemimpin itu. Ringkasnya, partisipan politik melakukan kegiatan bersama dan bersama-sama dengan para pemimpin politik, yaitu mereka sama-sama merupakan komunikator politik.

2. Faktor sosial-ekonomi (Nimmo, 2001:141)
Banyak cara menentukan seseorang untuk dikategorikan ke dalam kelas sosial mana; tetapi pada umumnya, kelas itu merupakan fungsi dari pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan orang. Anggota kelas atas dan kelas menengah adalah orang dengan pekerjaan profesional-manajerial dengan pendapatan tinggi dan berpendidikan akademis; anggota kelas menengah bisa pegawai administrasi atau pegawai keahlian (*skilled*) yang pendapatannya relatif baik dan seringkali, tetapi tidak terlalu, memiliki gelar akademis; kelas rendah mencakup buruh kasar dengan pendidikan sekolah menengah atau yang lebih rendah, penganggur, dan orang miskin. Pada umumnya, orang dari kelas lebih tinggi lebih sering berpartisipasi dalam politik ketimbang orang dari strata sosial yang lebih rendah.
3. Budaya politik (Nimmo, 2001:36)
Suatu cara penting opini publik dalam mempengaruhi apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah ialah menggunakan budaya politik. Pengaruh opini publik yang terbesar terhadap pembuatan keputusan pada pemerintah ialah dimilikinya budaya politik bersama oleh rakyat untuk memegang jabatan pemerintah. Budaya politik terdiri atas pola kecenderungan kepercayaan, nilai, dan pengharapan yang diikuti secara luas.
4. Struktur organisasi partai
Struktur ialah pelebagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu. Struktur politik sebagai salah satu *species* struktur pada umumnya, selalu berkenaan dengan alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan.
5. Model komunikasi
Komunikasi politik yang dilakukan partai politik bisa berupa lisan maupun tulisan. Komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan mempengaruhi perubahan aspek kognitif anggota yang meliputi paham ideologi dan platform.

Akibat Komunikasi Politik

Setelah menunjukkan preferensi untuk memikirkan tiga komponen opini yang saling lingkup, yakni kepercayaan, nilai, dan pengharapan, dan setelah menguraikan teori kebergantungan dari Ball-Rokeach dan Defleur yang cocok dengan pandangan itu, maka tepat bagi kita untuk merangkumkan akibat potensial

dari komunikasi dengan menggunakan kategori kognitif, apektif, dan behavioural yang digunakan dalam model kebergantungan.

1. Akibat kognitif

Situasi itu ambigu atau tidak, komunikasi membantu orang menentukannya. Seperti argumentasi Ball-Rokeach dan Defleur, media tidak menetapkan bahwa setiap orang menginterpretasikan peristiwa dengan seragam; namun, dengan mengontrol informasi apa yang disampaikan dan tidak disampaikan, dan bagaimana informasi itu disajikan, media dapat memainkan peran besar dalam membatasi keanekaragaman interpretasi yang dapat dibuat oleh khalayak.

Dengan menanggapi komunikasi, orang memperluas realitas politik yang dipersepsinya serta menginterpretasikan situasi yang ambigu dan rutin. Sistem politik seseorang bisa jadi kaya, bermacam-macam, dan mencakup masalah yang hampir tak terhitung, sementara yang lain berfokus sempit dan miskin rincian. Ia akan terbuka terhadap komunikasi oleh orang yang bergantung pada media dalam menyajikan informasi baginya untuk memperbesar sistem kepercayaan dan mencakup obyek politik yang lebih bervariasi (misalnya, menggabungkan isu dan kebijakan maupun personalia dan partai politik).

2. Akibat apektif

Ada konsensus umum bahwa komunikasi politik lebih cenderung diperhitungkan orang dalam menyusun kepercayaan politik ketimbang dalam nilai politik mereka. Semakin jelas, misalnya bahwa media massa mempengaruhi banyaknya informasi yang dimiliki orang tentang politik, sebagian karena akibat kognitif dari media dalam sosialisasi pada masa kanak-kanak dan yang didorong oleh hubungan kebergantungan.

Empat konsekuensi apektif yang potensial keluar dari komunikasi politik.

- a. Seseorang bisa menjernihkan, atau mengkristalkan, nilai politik melalui komunikasi politik.
- b. Orang bisa memperkuat nilai melalui komunikasi politik. Riset menunjukkan bahwa hal ini barangkali merupakan konsekuensi apektif dari komunikasi karena orang secara selektif memperhatikan pesan yang cocok dengan pandangannya, mempersepsi isi pesan sebagai sesuatu yang tidak mengancam, dan mengingat pesan yang mengukuhkan penilaian sebelumnya tentang objek politik.
- c. Komunikasi politik bisa memperkecil nilai yang dianut.
- d. Apakah imbauan politik memindahkan orang dari persuasi yang satu ke persuasi yang lain.

3. Akibat Partisipasi

Keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang agar secara aktif dapat terlibat dalam politik; di pihak lain, komunikasi politik bisa menekan partisipasi politik.

Apakah aktivasi dan deaktivasi, konsekuensi komunikasi politik bisa primer atau sekunder. Akibat primer terjadi jika orang yang dipengaruhi itu telah melibatkan diri secara langsung ke dalam proses komunikasi. Konsekuensi sekunder dari komunikasi terjadi jika orang yang tidak terlibat secara langsung dalam komunikasi terpengaruh oleh perubahan pada orang yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. (Soehartono, 2002: 35). Metode deskriptif ini ditujukan untuk menganalisa masalah-masalah yang mendeskripsikannya dalam bentuk tulisan “Metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi, penelitian dengan teknik survey, interview, angket, observasi, atau dengan teknik test, studi komparatif, studi waktu dan gerak, analisa kuantitatif, studi kooperatif atau operasional” (Surakhmad, 1998:139). Penelitian ini memfokuskan pada komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan mempengaruhi perubahan aspek kognitif anggota yang meliputi paham ideologi dan *platform*, yaitu:

1. Penyampaian program-program PDIP, dari tingkat Kabupaten sampai kepada tingkat Desa.
2. Penyampaian pesan-pesan politik kepada kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
3. Arah dan kebijakan partai, serta strategi pemenangan partai.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, partisipasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi, studi pustaka, studi lapangan. “Observasi dengan partisipasi berarti pengamat ikut menjadi partisipan” (Mulyana, 2001:89). Ringkasnya metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistemik. Kalau pengamatan dilakukan dengan sambil lalu dan tidak memenuhi prosedur dan aturan yang jelas tidak bisa disebut observasi. “Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan di sini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan” (Soehartono, 1998:69). “Wawancara tak terstruktur sering disebut wawancara mendalam bersifat luwes, susunan pertanyaannya susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dsb) responden yang dihadapi” (Mulyana, 2001:181). Sedangkan studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi tapi juga artikel-artikel di majalah Gema Perjuangan, risalah rapat, notulensi rapat, dan lain-lain. Studi pustaka, yaitu dengan melakukan kajian terhadap buku, literatur, Peraturan perundang-undangan dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Studi lapangan, yaitu mengadakan penelitian secara langsung dilokasi yang telah ditetapkan yaitu di Kecamatan Essang untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan komunikasi politik partai politik. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder.

Sedangkan yang menjadi Informan dipilih secara *purposive* yaitu di mana pengambilan informan berdasarkan tujuan penelitian. Informan yang akan dijadikan sebagai anggota informan adalah:

1. Pengurus Partai politik, masing-masing: Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat.
2. Masyarakat Kecamatan Essang, masing-masing 2 orang mewakili setiap desa.

Dalam menganalisis data yang sudah ada, digunakan teknik metode kualitatif dengan interpretasi.

PEMBAHASAN

1. Komunikasi Politik PDIP Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Menyampaikan Program Pemerintah Kepada Kader Partai dan Masyarakat

Komunikasi politik sangat berpengaruh pada suatu sistem politik. Pada suatu negara, sistem politik yang sehat harus didukung oleh komunikasi politik yang dijalankan dan digiatkan oleh partai-partai politik. Partai politik ini adalah pihak yang dinilai paling bertanggung jawab atas berjalannya komunikasi politik. Fungsi komunikasi politik lebih banyak mengacu pada posisi komunikasi yang paling klasik. Secara umum semua fungsi input yang terdapat dalam suatu sistem politik sosialisasi dan rekrutmen politik, perumusan kepentingan, penggabungan kepentingan, yang dapat menghasilkan peraturan serta kemudian menjalankan peraturan tersebut- adalah merupakan bagian dari kajian komunikasi. Secara sederhana, komunikasi politik didefinisikan sebagai: proses penyampaian pesan/informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat, dan dari masyarakat kepada pemerintah.

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik yaitu: berperan sebagai penyalur aneka pendapat dan aspirasi masyarakat yang beragam kemudian mengaturnya sedemikian rupa serta menampung dan menggabungkan pendapat dan aspirasi tersebut. Proses seperti ini dinamakan *interest aggregation* atau 'penggabungan kepentingan'. Setelah itu pendapat dan aspirasi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur (*interest articulation*) yang akan diajukan sebagai usul dari kebijakan partai politik. Selanjutnya, partai politik akan memperjuangkan agar pendapat dan aspirasi tersebut dapat dijadikan kebijakan umum (*public policy*) oleh pemerintah. Tuntutan dan kepentingan masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Selama ini proses penyampaian program yang dilakukan oleh partai politik khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tingkat kabupaten sampai ke desa-desa yang ada di Talaud, dirasa masih belum optimal. Kurang optimalnya pelaksanaan komunikasi internal partai ini juga disebabkan oleh masih minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Partai, ditambah pula dengan kondisi topografi yang berbentuk kepulauan, dimana transportasi yang digunakan hanya menggunakan kapal (*speedboat*), sehingga memperlambat penyampaian-penyampaian informasi dari kabupaten. Dilain pihak, para personil PAC PDIP Kecamatan Essing, mampu untuk berkomunikasi dengan para kader maupun masyarakat luas, mengenai program-program partai, karena masing-masing pengurus telah diberikan pembekalan, dan diberikan buku saku partai yang isinya berupa visi, misi, dan program partai, namun program-program partai tersebut hanyalah sebatas pada program nasional, tidak dalam skala regional kabupaten kepulauan Talaud.

Membangun sebuah pondasi yang kuat untuk sebuah komunikasi politik organisasi atau partai politik tentu bukanlah hal yang mudah. Namun, hal tersebut tetap harus dilaksanakan guna menciptakan stabilitas organisasi atau partai politik melalui pendekatan yang demokratis. Rutinitas komunikasi yang terbangun di dalam internal partai politik dinilai sangatlah penting. Namun, di dalam internal Partai PDIP sendiri hal tersebut belum mampu terealisasi secara maksimal. Tidak terealisasinya rutinitas komunikasi tersebut, bukan menjadi masalah berarti bagi Partai PDIP, karena Anggota DPRD yang diutus melalui PDIP Talaud,

diasumsikan menjadi bagian penting yang membuat komunikasi antara kedua elemen ini menjadi semakin mudah. Semua informasi di dalam DPRD Kabupaten Talaud dapat secara langsung dikomunikasikan kepada DPC PDIP Talaud sehingga menjadikannya lebih efektif dan kuat.

Komunikasi yang terbangun tidak akan berarti apabila aspirasi masyarakat tidak dapat tersalurkan secara maksimal. Seorang anggota dewan merupakan wakil dari masyarakat yang mempunyai tanggung jawab untuk menjadikan aspirasi tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan sebuah kebijakan. Orientasi pengambilan keputusan untuk masyarakat merupakan tanggung jawab moral yang harus dipenuhi oleh anggota dewan karena mereka merupakan cerminan dari masyarakat yang telah dipilih oleh masyarakat. Namun, PDIP sendiri belum bisa secara maksimal dalam menampung aspirasi masyarakat.

Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya program-program yang benar-benar disusun untuk menampung aspirasi masyarakat atau konstituen dari anggota dewannya. Terbatasnya program dalam penampungan aspirasi masyarakat menjadikan keberadaan anggota dewan menjadi kurang maksimal karena telah keluar dari substansi keberadaan anggota dewan itu sendiri. Adapun dalam menanggapi sebuah keputusan, seorang anggota dewan diharuskan untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh partai politiknya. Hal tersebut membuat anggota dewan tidak dapat secara leluasa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat atau konstituennya karena perlu persetujuan dari partai politik.

Hal tersebutlah yang menjadi alasan di mana seorang anggota dewan tidak dapat secara leluasa dalam menyuarakan aspirasi masyarakat atau konstituennya karena terdapat keharusan untuk meminta persetujuan dari partai politik. Jadi, sangat dimungkinkan seorang anggota dewan mengambil sebuah keputusan yang tidak sesuai dengan batin mereka masing-masing karena berseberangan dengan keinginan konstituen. Kenyataan tersebut memperlihatkan secara jelas bagaimana partai politik berperan besar dalam pengambilan sebuah keputusan di dalam lembaga legislatif baik di tingkat local maupun nasional. Adanya instruksi dari partai politik merupakan aturan yang harus dijalankan bagi setiap anggota dewan tanpa terkecuali, inilah yang kemudian disebut sebagai garis-garis prinsipil dari partai politik yang harus dijalankan oleh setiap kader atau anggotanya.

Model komunikasi di atas menuntun anggota dewan mampu menemukan titik temu pada setiap permasalahan yang ada sehingga tidak terjadi pertentangan antara anggota dewan dengan partai politiknya masing-masing. Dengan titik temu pada setiap permasalahan, diharapkan akan tercipta stabilitas politik di dalam partai politik. Apabila titik temu tersebut tidak kunjung didapatkan dan menjadi perbedaan di dalam pengambilan keputusan, partai politik tidak segan-segan untuk memberhentikan anggota dewan tersebut dari kursi jabatannya karena dianggap telah melanggar garis-garis yang telah ditentukan oleh partai politik.

Di sinilah komunikasi antara ketiga pihak, yaitu partai politik, anggota dewan serta masyarakat harus terbangun dengan baik sehingga akan menimbulkan iklim demokrasi yang kondusif tanpa menjadikan stabilitas politik sebagai pembenaran bagi alasan partai politik memberhentikan anggota dewannya. Tanpa adanya komunikasi antara partai politik dengan masyarakat, maka keberadaan anggota dewanpun tidak akan begitu maksimal karena pengambilan sebuah keputusan di tingkatan parlemen lebih dipengaruhi oleh keputusan fraksi atau partai politik. Sistem yang terbangun di lembaga perwakilan atau parlemen

tersebut menjadikan makna dari perwakilan rakyat menjadi rancu. Secara ideal, perwakilan rakyat adalah seorang anggota dewan yang telah dipilih secara langsung oleh masyarakat atau konstituennya. Apabila kita melihat konsep *Delegated Representation* di mana seorang wakil diartikan sebagai juru bicara atas nama kelompok yang diwakilinya. Dengan demikian, seorang wakil tidak boleh bertindak di luar kuasa yang memberi mandat. Makna ideal dari siapa yang diwakili oleh seorang anggota dewan adalah masyarakat atau konstituennya. Namun, sistem yang terbangun saat ini mendorong makna yang diwakili tersebut kepada partai politik.

Program-program pemerintah daerah yang seharusnya disampaikan oleh kader partai yang duduk di lembaga legislatif dalam masa resesnya, terkadang tidak maksimal disampaikan kepada kader dan masyarakat, kebanyakan kader dan masyarakat belum mengetahui program-program pemerintah, hal ini apabila dikaji lebih jauh disebabkan oleh kurangnya intensitas pertemuan-pertemuan kader dan simpatisan partai dalam rapat maupun sosialisasi program, hal-hal yang diperjuangkan oleh partai, keberhasilan partai memperjuangkan aspirasi kader, simpatisan dan masyarakat, sehingga fungsi partai sebagai sarana komunikasi politik dirasa belum maksimal.

2. Program-program PDIP yang meliputi: Penyampaian Pesan-Pesan Politik, Arah dan Kebijakan Partai, serta Strategi Pemenangan Partai

Komunikasi efektif merupakan penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan dan komunikasi tersebut saling feedback. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada.

Dunia politik di butuhkan juga komunikasi yang efektif dalam berpolitik. Karena kegiatan politik harus dilandasi oleh kegiatan komunikasi untuk menyalurkan ide, gagasan, dan perjuang dalam bidang-bidang penting dalam negara. Apabila seorang politisi tidak membicarakan tentang ide, gagasan, dan perjuangan bidang-bidang penting dalam negara, melainkan membicarakan tentang gaya hidupnya seperti yang dilakukan oleh beberapa politisi dari kalangan selebriti, artinya ia sedang tidak berperan sebagai politisi.

Fungsi komunikasi politik dapat dibedakan kepada dua bagian. Pertama, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah *the governmental political sphere*, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas.

Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah *the socio political sphere*, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut.

Apabila dilihat secara umum, maka fungsi komunikasi politik pada hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur

yang bersifat interdependensi dalam ruang lingkup negara. Komunikasi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespons sehingga mencapai saling pengertian dan diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Peran Pers dalam memberikan Informasi/Pesan-Pesan Politik Partai

Pers merupakan lembaga sosial dan lembaga komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data, dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan jenis saluran lain yang tersedia.

Pers menjalankan fungsinya dengan cara menyampaikan informasi kepada khalayak umum. Nilai informasi ini dapat dilihat dalam kaitan dengan keberadaan serta kedudukan dalam sistem sosial. Pers dapat menjalankan fungsi dan mempunyai kedudukan tertentu dalam sistem politik, ekonomi, atau pun sosio kultural.

Pada sistem politik dalam masyarakat yang demokratis, lembaga/media pers biasa disebut sebagai pilar ke-empat demokrasi (*the fourth estate*). Lembaga pers melengkapi tiga pilar yang menyangga kehidupan masyarakat yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan adanya empat fungsi yang berbeda dalam *polity* ini, masyarakat yang hidup berdasarkan asas dan nilai demokrasi diharapkan dapat lebih terjamin untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan terutama dalam bidang perolehan informasi.

Pandangan bahwa pers merupakan lembaga ke-empat dalam sistem politik ini pada awalnya hanya berkembang pada masyarakat *barat* yang berdasarkan nilai demokrasi dengan tiga pilar sistem politik berdasarkan disiplin otonomi dari masing-masing pilar, dan pemilihan fungsi secara ketat.

Keberadaan pers sebagai institusi ke-empat yang setara dengan institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, hanya dapat terwujud jika antara ketiga pilar lainnya memiliki fungsi otonom dan hubungan bersifat *check and ballance* satu sama lain. Karenanya dalam menempatkan kedudukan institusi pers dalam suatu masyarakat perlu dilihat lebih dahulu sifat hubungan dan posisi dari ketiga pilar. Kedudukan pers sebagai pilar ke-empat hanya mungkin terjadi jika dalam *polity* keberadaan setiap institusi politik merupakan perwujudan dan akulturasi dari warga masyarakat.

Jika kedudukan pers sebagai pilar ke-empat demokrasi sudah tercapai dalam arti *policy* mempunyai kestabilan politik maka kehadiran pers tersebut bisa menggantikan fungsi pengawasan, yang seharusnya dilakukan ketiga lembaga tersebut. Selain itu pers bisa menjadi pengontrol lembaga masyarakat bila terlihat menyimpang dari demokrasi dan hukum yang berlaku.

Fungsi pers secara umum adalah: memberi informasi, mendidik, memberikan kontrol, dan menghubungkan atau menjembatani. Birokrasi politik juga berkencenderungan untuk mempengaruhi media pers. Bagi birokrasi politik, pers dapat digunakan sebagai alat dalam melindungi sistem demokrasi ataupun merekayasa sistem otokrasi masyarakat, tergantung cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan komunikasi politik di Indonesia tentu tidak terlepas dari kebebasan pers. Di era keterbukaan yang dikenal dengan istilah masa global,

peranan pers sebagai sarana komunikasi politik di Indonesia sangat penting untuk menyalurkan berbagai kebijakan kepada masyarakat, baik yang datang dari atas maupun bawah.

Setelah berakhirnya Rezim Soeharto, pada tanggal 21 Mei 1998, akibat gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi, maka semasa pemerintahan Presiden B.J Habibie cengkeraman pemerintah terhadap pers dihapuskan. Namun kebebasan pers digunakan secara berlebihan sehingga orang mulai bicara tentang kebablasan pers. Meskipun dari pihak penguasa berkurang intervensinya, kelompok-kelompok penekan timbul dalam masyarakat yang bertindak anarkis terhadap pers.

Selama kebebasan pers dapat dipertahankan, kemungkinan lebih besar dalam abad informasi ini bagi pesatnya perkembangan pers Indonesia dan menjelma sebagai *the fourth estate* di samping eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai frekuensi tidak hanya terhadap dinamika politik, melainkan juga terhadap dinamika sistem lainnya yang menunjang penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembangunan sistem politik yang demokratis tersebut diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia, dan makin memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem komunikasi politik di Indonesia dikembangkan dengan dasar komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab. Setiap media massa bebas memberitakan suatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, tidak membahayakan kepentingan negara dan masyarakat. Di samping itu media massa juga berfungsi menyuarakan suara pembangunan dan program-program kerja pemerintah, menyuarakan ide-ide politik, membina tumbuhnya kebudayaan politik kemudian memelihara dan mewariskannya pada generasi penerus. Namun harus diakui peran media massa bagi kepentingan sosialisasi partai politik masih belum maksimal.

Sistem komunikasi Pemerintah, belum mempunyai strategi sistem komunikasi untuk memberdayakan masyarakat. Seharusnya ada sistem komunikasi nasional, sehingga dapatlah dibicarakan subsistem media cetak dan siaran. Pemerintah harus membekali para wartawan agar berita-berita yang ditampilkan dapat menggambarkan situasi demokrasi yang faktual dan mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam membangun sistem politik Indonesia yang lebih baik.

Media massa di Indonesia diharapkan juga dapat mendidik masyarakat agar lebih memahami ilmu politik praktis dan perkembangan situasi politik nasional yang sebenarnya, dan media massa harus mampu menampilkan pemberitaan secara adil (*fairness*) dan faktual (*factual/accurate*) walaupun menganut azas kebebasan pers. Sistem dan dinamika media massa di suatu negara pun dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai sistem demokrasi yang dianut oleh negara tersebut.

Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat me-manage seluruh media massa sebagai alat untuk pembangunan politik, sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Jadi berita yang ditampilkan tidak selalu memojokkan pemerintahan yang berkuasa dan cenderung sekadar menjatuhkan, tetapi seharusnya menjadi

sarana kritik yang konstruktif dan objektif bagi kelangsungan pembangunan yang demokratis.

3. Komunikasi Politik PDIP dan Anggota Dewan Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat di Kecamatan Essing

Kuatnya keterkaitan antara partai politik dengan anggota dewannya menuntut adanya kerjasama yang baik antara keduanya. Kerjasama tersebut berupa komunikasi timbal balik antara kedua elemen sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat yang muncul dikalangan publik. Dalam sistem perwakilan di Indonesia, partai politik diwakili oleh fraksinya masing-masing di dalam parlemen atau lembaga perwakilan. Peranan fraksi sebagai kepanjangan tangan partai politik sangatlah besar meskipun fraksi bukanlah alat kelengkapan dari DPRD. Perbedaan pendapat di dalam internal fraksi sangatlah mungkin, hal ini mengingat bahwa fraksi dapat terdiri dari beberapa partai politik. Hal ini dinilai sangatlah wajar karena setiap partai politik tentu memiliki tujuan atau orientasi politik yang berbeda. Namun, di dalam internal partai politik, perbedaan pendapat menjadi suatu tindakan yang amat dihindari demi terjaganya stabilitas, citra partai politik di masyarakat dan tujuan politik dari partai politik tersebut.

Kuatnya komunikasi yang terbangun tersebut belum diimbangi dengan kuatnya komunikasi yang terbangun antara partai politik dengan masyarakat atau anggota dewan dengan masyarakat. Tanpa adanya sistem komunikasi yang terbangun ke masyarakat, substansi keberadaan partai politik dan anggota dewan menjadi tidak maksimal. Pada umumnya partai politik didirikan atas prinsip mayoritas, dan selalu dibangun atas prinsip massa. Masyarakat merupakan bagian penting yang harus diperjuangkan oleh partai politik sehingga perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Partai PDIP belum secara maksimal memperhatikan masyarakat sebagai konstituen dari anggota dewannya. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya program-program yang telah disusun untuk menampung aspirasi masyarakat. Di lain sisi, anggota dewan dari Fraksi Partai PDIP juga kurang memperhatikan konstituennya. Mereka tidak mempunyai program-program yang telah disusun untuk menampung aspirasi masyarakat. Hingga kini, mereka hanya menampung aspirasi konstituen melalui sms atau telepon. Komunikasi yang kurang sehat ini juga dipengaruhi oleh sistem perwakilan yang terbangun di lembaga legislatif. Peranan partai politik yang sangat besar mendorong anggota dewan untuk lebih pasif dan menunggu instruksi dari partai politik. Bukan tanpa alasan, aspirasi masyarakat yang telah ditampung tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan oleh anggota dewan. Mereka harus menunggu kebijakan dari partai politik sehingga tidak semua aspirasi masyarakat yang diterima anggota dewan dapat dilaksanakan.

Dilain pihak PAC PDIP Essing sendiri tidak terlalu berperan untuk menekan perwakilannya yang duduk di anggota DPRD agar memprioritaskan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat dari kecamatan Essing.

Kuatnya peran partai politik dalam sistem perpolitikan di Indonesia seharusnya diimbangi dengan program-program berorientasi masyarakat. Kenyataan anggota dewan yang pasif menuntut partai politik untuk berperan aktif dalam menampung aspirasi masyarakat. Tanpa adanya peran aktif dari partai politik, maka partai politik tidak akan mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Padahal, partai politik memegang peranan penting dalam menentukan

sikap atau keputusan politik di dalam lembaga legislatif melalui fraksinya masing-masing. Besarnya peran partai politik mulai menggeser substansi representasi yang mulanya berada pada anggota dewan secara individu menjadi representasi kepada fraksi atau partai politik.

Kenyataan ini harus secepatnya diimbangi dengan model komunikasi kepada masyarakat yang baik. Tanpa adanya komunikasi kepada masyarakat dari partai politik, maka demokratisasi di Indonesia akan semakin sulit untuk menuju negara yang demokratis. Seorang anggota dewan tidak memiliki kebebasan dalam melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan keinginan pribadi atau konstituennya. Hal tersebut terlalu beresiko terhadap kelangsungan jabatannya karena partai politik memiliki kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian seorang anggota dewan kepada lembaga legislatif. Hal ini kemudian berdampak panjang terhadap kinerja anggota dewan yang cenderung pasif dan tidak menciptakan komunikasi yang kuat kepada masyarakat sebagai konstituen mereka. Sistem yang terbangun ini akan mendorong berkembangnya karakter pemerintahan yang oligarki di Indonesia. Hanya akan ada beberapa orang atau elite politik yang menjadi pemain kunci di dalam sistem perpolitikan di Indonesia. Hal tersebut tentunya patut dihindari karena akan mencederai arti demokrasi yang sesungguhnya dengan sistem yang lebih demokratis.

Komunikasi politik yang kuat antara ketiga elemen ini, yaitu partai politik, anggota dewan dan masyarakat akan sangat mempengaruhi terhadap sistem politik serta budaya politik. Terbangunnya komunikasi politik yang sehat antara ketiga elemen tersebut hanya dapat dicapai apabila sistem yang terbangun telah memberikan peran kepada masing-masing elemen sesuai porsi. Seorang anggota dewan harus dijamin kebebasannya secara bertanggung jawab, sedangkan partai politik juga harus dibatasi kewenangannya guna menjaga kebebasan seorang wakil rakyat yang telah diberi mandat oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Kedaulatan rakyat adalah konsekuensi logis dari adanya kebebasan dan *equality of the people* yang kemudian menghendaki adanya hierarki penguasaan yang didasarkan atas persetujuan lebih dahulu dari orang-orang yang sama hak tersebut untuk dapat diperintah. Rakyat itu sendiri yang berhak menentukan siapa dan bagaimana mereka harus diperintah dalam struktur hidup bernegara. Rakyat berhak sama dalam menarik mandat dari orang-orang yang tidak dapat mewujudkan dan menjalankan aspirasi mereka.

Lembaga perwakilan dibentuk oleh masyarakat melalui partai politik sehingga porsi akan hak dan kewajiban dari setiap elemen harus benar-benar diperhitungkan. Hal ini guna menjaga agar sistem yang terbangun nantinya merupakan sistem yang adil bagi setiap elemen, tanpa mengkerdilkan salah satu elemen. Apabila sistem yang ada saat ini masih terus berlangsung, maka konsekuensi yang terjadi adalah semakin terpinggirkannya hak-hak yang dimiliki anggota dewan dan juga masyarakat sebagai konstituennya. Tidak kalah penting, komunikasi antara ketiga elemen ini juga harus berjalan secara timbal balik guna menghindari kesalahpahaman antara partai politik, anggota dewan, maupun masyarakat sehingga kedaulatan rakyat tetap terjaga.

Partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, termasuk didalamnya PDIP Kecamatan Essing, yaitu:

Pertama, berperan sebagai penyalur aneka pendapat dan aspirasi masyarakat yang beragam kemudian mengaturnya sedemikian rupa serta menampung dan menggabungkan pendapat dan aspirasi tersebut. Proses seperti ini dinamakan

interest aggregation atau 'penggabungan kepentingan'. Setelah itu pendapat dan aspirasi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur (*interest articulation*) yang akan diajukan sebagai usul dari kebijakan partai politik.

Selanjutnya, partai politik akan memperjuangkan agar pendapat dan aspirasi tersebut dapat dijadikan kebijakan umum (*public policy*) oleh pemerintah. Tuntutan dan kepentingan masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Kedua, berfungsi sebagai sarana untuk memperbincangkan dan menyebarkan rencana dan/atau kebijakan pemerintah (sebagai *political socialization*). Arus informasi dan dialog antara masyarakat dan pemerintah berlangsung secara timbal balik.

Ketiga, berfungsi sebagai penghubung sekaligus penerjemah antara pemerintah dan warga masyarakat. Kebijakan pemerintah yang biasanya dirumuskan dengan menggunakan bahasa teknis, oleh partai politik dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang dapat dipahami masyarakat sehingga komunikasi politik antara pemerintah dan warga masyarakat dapat berlangsung secara efektif.

Partai politik sebagai media komunikasi politik, yang menghubungkan atau mengagregasikan antara pemerintahan dengan masyarakat. Partai adalah corong bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritikan yang sifatnya konstruktif atas pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Agar terhindar pula dari kesewenang-wenangan pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan untuk masyarakat pada umumnya karena sangat berkaitan sekali dengan kesejahteraan masyarakat sebagai obyek dari aturan. Partai akan memediasi masyarakat dengan pemerintah untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kehidupan yang lebih baik. Karena seluruh aspirasi masyarakat akan diakomodir oleh partai melalui wakil-wakilnya di parlemen. Fungsi komunikasi politik parpol sangat vital untuk menyampaikan hal-hal yang sangat urgen dari kebijakan pemerintah. misalnya kenaikan harga BBM, kenaikan tarif dasar listrik, aturan-aturan lainnya yang menyangkut hajat masyarakat. Parpol sebagai corong untuk menyampaikan kritikan atas pemerintahan yang menjalankan undang-undang, karena jika masyarakat tidak melakukan otokritik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan maka pemerintah akan sewenang-wenangnya menjalankan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, namun sayangnya ada asas pemanfaatan yang dilakukan oleh oknum partai yang dipercayakan duduk di lembaga pemerintahan (eksekutif) maupun legislatif.

Selain dari fungsi sebagai media masyarakat untuk menghubungkan dengan pemerintah, maka fungsi komunikasi politik yang lain adalah menyelesaikan masalah (konflik). Akan tetapi jika kita melihat realitas kekinian partai politik pada dasarnya yang memiliki fungsi-fungsi di atas sangat jauh dari harapan karena sebagian besar terjadinya konflik di Indonesia adalah akibat dari partai politik. pasca pemilihan umum (presiden dan legislatif). Banyak kandidat partai yang merasa kecewa atas hasil penghitungan suara, sehingga menggerakkan (mobilisasi) para kader untuk menyerang kantor KPU, kader partai lain, sekret partai lain bahkan memicu konflik etnis dll artinya parpol sekarang belum melakukan fungsinya secara baik dan maksimal. Karena masih meninggalkan ironi dan anomali sistemik yang di munculkan, adanya konflik SARA yang menyebabkan manusia beragam nyawanya hanya karena kandidat yang kalah mengerahkan massanya untuk menyerang kandidat yang lain karena tidak merasa puas atas hasil pemilihan KPU.

Beberapa implementasi komunikasi politik yang dapat dijadikan acuan sebagai salah satu strategi pemenangan PDIP Essing adalah:

1. Bergerak dan membangun komunikasi politik di Semua level

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa, komunikasi dapat dilakukan dalam beberapa tingkatan/level, dari individu, kelompok, organisasi hingga komunikasi massa. Strategi komunikasi yang dilakukan di semua level dan lini untuk membangun opini publik sebagai salah satu cara pemenangan PDIP di Kecamatan Essing.

2. Penggunaan Media Massa Modern dan Media Komunikasi Lokal

Dalam pembangunan opini publik, media massa merupakan salah satu media yang sangat strategis. Sedangkan menurut Mcquail media paling baik digunakan secara terencana untuk menimbulkan perubahan dengan menerapkannya dalam program yang berskala besar. Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, media massa merupakan media yang dapat menjangkau secara luas ke seluruh pelosok dan penjuru masyarakat tanpa orang atau tokoh harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Melalui media massa pembangunan opini publik dapat dilakukan tanpa harus tokoh politik hadir di masyarakat.

Di samping menggunakan media massa, dapat juga menggunakan media pertemuan langsung dengan masyarakat. Pertemuan langsung ini dapat dikemas dengan bentuk pertemuan lokal, sehingga jenis pertemuannya sangat bervariasi sesuai dengan kondisi lokal dimana pertemuan itu berlangsung. Sejalan dengan pendekatan lokal ini, bahasa komunikasi yang dibangun juga dengan menggunakan term-term low context. Artinya bahasa komunikasi yang digunakan cenderung dengan bahasa-bahasa yang sederhana, tidak dengan bahasa tinggi atau yang ilmiah, menggunakan istilah-istilah.

3. Politik Pencitraan

Menurut Schuller inti politik sukses adalah membangun kepercayaan publik. Kandidat perlu dikenal dulu baru mereka percaya. Pencitraan tokoh merupakan pintu bagi masyarakat untuk memilih kandidat di pemilihan lokal. Pencitraan merupakan gambaran yang dimiliki oleh orang banyak tentang diri, pribadi, atau organisasi atau produk. *Political image* yang dapat diusung oleh partai politik adalah membangun image kepada masyarakat bahwa partai politik tersebut merupakan partai yang sederhana, bersahabat, bersahaja, dan diterima oleh semua kalangan. Pencitraan ini dapat dimunculkan melalui pemasangan baligo, spanduk dan lain sebagainya.

Dua level dalam berkomunikasi yakni penyampaian informasi dan gaya dalam menyampaikan pesan. Komentar yang diberikan baik secara serius maupun bercanda akan diinterpretasikan penerima menjadi gaya berkomunikasi di pembicara. Gaya pesan ini akan terjadi berulang-ulang. Dari gaya berkomunikasi inilah orang akan menilai bagaimana tipe partai tersebut. Untuk melihat dukungan politik, tidak dapat dilakukan dengan berasumsi. Ini sangat berbahaya dalam pertarungan politik. Kita harus mengetahuinya secara nyata atau riil di masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui dukungan politik di masyarakat adalah dengan melalui *voter intelligence*. Teknologi politik yang sekarang sudah berkembang akan sangat membantu melihat perilaku politik masyarakat secara riil dan ilmiah. Berbagai bentuk kegiatan seperti: pooling, FGD, media analisis, dan penelitian ilmiah merupakan cara yang dapat digunakan untuk melakukan voter intelligence.

Dalam mengadakan komunikasi, maka setiap orang mempunyai strateginya masing-masing, yaitu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Apabila strategi menyatakan bahwa dalam proses komunikasi yang dialaminya, ada perimpitan kepentingan, maka barulah ada kemungkinan bahwa komunikasi itu berhasil. Mengingat bahwa proses komunikasi berpangkal pada pikiran dan harapan orang, maka proses komunikasi selalu sukar apalagi untuk mencapai komunikasi

komunikasi yang efektif. Apabila komunikasi berjalan dengan harmonis beberapa waktu (artinya ada persamaan dalam tujuan terakhir), maka tercapailah partisipasi. Partai politik merupakan wadah untuk mencapai tujuan-tujuan, partai politik harus mendefinisikan tujuan-tujuan ini dan alat/cara dengan apa tujuan itu dicapai. Hal tersebut merupakan fungsi dari seorang pemimpin. Fungsi perencanaan meliputi mendefinisikan tujuan partai politik, menetapkan suatu strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan ini, dan mengembangkan suatu hirarki rencana yang menyeluruh untuk memadukan dan mengkoordinasi kegiatan-kegiatan. Para pemimpin politik juga bertanggungjawab untuk merancang struktur partai politik. Kita sebut fungsi ini pengorganisasian. Fungsi ini mencakup penetapan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, siapa membawahi siapa, dan dimana keputusan harus diambil.

Komunikasi politik juga dapat diperhitungkan sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh partai politik untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Namun jika mengharapkan tujuan yang harus dicapai, maka harus terlebih dahulumerperhitungkan hal-hal yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan komunikasi politik harus menggunakan SWOT analisis. Diantaranya ada seberapa besar kekuatan yang ada di dalam PDIP, dan kelemahan apa saja yang dimiliki oleh PDIP. Ini dapat dilihat dari internal partai itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah peluang apa saja yang dimiliki oleh PDIP Essing, dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh partai tersebut. Ini dapat dilihat dari ekstern partai. Dengan menganalisis hal tersebut, maka diharapkan PDIP Essing dapat mengukur seberapa besar potensi yang dimilikinya dalam pencapaian tujuan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Penyebab komunikasi politik yang dilaksanakan oleh PDIP tingkat kabupaten sampai dengan ke tingkat kecamatan dan desa belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena masih kurangnya informasi mengenai program-program PDIP yang dibuat oleh DPC PDIP Kabupaten Kepulauan Talaud, maupun program-program pemerintah daerah, selain itu masih minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki PDIP, dan topografi Talaud yang berbentuk kepulauan, yang tidak dapat ditempuh dengan perjalanan darat, serta kurang intensnya pertemuan antar kader dan simpatisan bahkan masyarakat dengan kader partai yang duduk dalam lembaga legislatif. Namun kenyataan itu cukup terbantu dengan peran media (Pers) dalam memberikan informasi dan program-program partai di kecamatan Essing. Fakta lain komunikasi politik yang dilakukan perwakilan PDIP yang duduk di legislatif dari kecamatan Essing belum efektif, karena adanya keterbatasan yang ditetapkan oleh internal partai, sehingga anggota legislatif tersebut tidak dapat langsung menyuarakan aspirasi masyarakat tersebut, tetapi harus mengunggu petunjuk dan mekanisme yang ditetapkan oleh PDIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhan Dambea. 2010. *Komunikasi Politik*. Gorontalo: Yayasan Al-Adha dan Yayasan SERAT Manado.
- Budiardjo, Mirriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Eko, Sutoro. 2001. *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Politik Pemberdayaan*. Riau: Seminar Internasional Ke Dua.
- Kartaprawira, Rusadi. 1999. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kencana, Inu. 1994. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koirudin. 2004. *Partai politik dan Agenda Transisi Demokrasi: Menakar Kinerja Partai politik Era Transisi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2001. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 1989. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rush, Michael dan Philip Althoff. 1995. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soehartono, Irawan. 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soeratno & Arsyad, Lincoln. 1995. *Metodologi Penelitian: Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Taopan. 1989. *Demokrasi Pancasila: Analisa Konseptual Aplikatif*. Kupang: Sinar Grafika.
- Uchjana Effendy, Onong. 2002. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2002. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- LAINNYA:
- Makalah seminar. 2001. *Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Politik Pemberdayaan*. Riau.
- Majalah Gema Perjuangan. 2004. *Lima Resep Dari Megawati*. Jakarta: Gema Sejati.